

**CONSTRUCTIVE ENGAGEMENT SEBAGAI STRATEGI KEBIJAKAN POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA DALAM MENDUKUNG DEMOKRATISASI DI MYANMAR**

*Constructive Engagement as Indonesia's Foreign Policy Strategy in promoting Democratization in
Myanmar*

Oleh Nabilla Syahaya Putri Aryani
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Pendidikan Ilmu Hubungan Internasional
cnabila84@yahoo.com

ABSTRAK

Munculnya pendekatan konstruktif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap hubungan bilateralnya dengan Myanmar merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap penyelesaian masalah demokrasi dan krisis kemanusiaan yang menimpa Myanmar, pendekatan ini juga juga terkonstruksikan oleh adanya preseden regional dalam nilai ASEAN way yang menekankan pada prinsip non intervensi yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam merumuskan strategi kebijakan politik luar negeri Constructive Engagement dalam mendukung demokratisasi di Myanmar. Strategi ini bertolak belakang dengan kebijakan disinsentif yang diterapkan oleh negara-negara Barat terhadap Myanmar, sebab dalam penerapannya strategi ini mengedepankan upaya dialog, consensus dan penguatan kerjasama yang dapat mendorong trend positif dalam proses transisi politik Myanmar.

Kata Kunci: Kebijakan Politik Luar Negeri, Constructive Engagement, Demokratisasi, Indonesia, Myanmar

ABSTRACT

The emergence of a constructive approach conducted by Indonesian Government towards its bilateral relations with Myanmar known as a form of Indonesia's responsibility to be involved in the settlement of democratic issues and the humanitarian crisis within Myanmar. This approach

constructed by regionalism precedent of ASEAN Way Values which reaffirm the consideration of the Indonesian Government in the making process of Constructive Engagement foreign policy to promote democratization in Myanmar. This Strategy opposed disincentive policies implied by Western Countries towards Myanmar. As in its implementation, Constructive Engagement strategy accentuates the attempts of dialogue, consensus and strengthening cooperation between countries to create social and economic development within Myanmar and bring the positive trend in the process of Myanmar's political transition.

Keywords: Foreign Policy, Constructive Engagement, Demokratization, Indonesia, Myanmar

A. Pendahuluan

Indonesia dan Myanmar merupakan dua negara di Kawasan Asia Tenggara yang sempat mengalami masa-masa transisi politik. Kedua negara yang berjarak 4.000 km ini memiliki kesamaan historis yang dimulai dari perjuangan pahit meraih kemerdekaan dari negara koloni, selain itu baik Indonesia maupun Myanmar memiliki kesamaan lainnya dalam latar belakang sistem politik. Kedua negara di Kawasan ini mengalami sistem pemerintahan otoriter yang sangat ekstrim. Rezim militer telah mendominasi sistem politik dua negara tersebut pasca runtuhnya demokrasi parlementer pada tahun 1950an. Tepatnya pada tahun 1952 setelah rezim demokratis di Myanmar runtuh, sejak saat itu negara ini berada di bawah pimpinan dengan gaya otoriter dan diktator dimana seluruh kebijakan dibuat oleh pimpinan militer Rangoon, yang dipimpin oleh Jendral Ne win yang berkuasa selama dua dekade (1962-1988) di bawah kekuasaannya Myanmar ditransformasi menjadi negara yang isolasionis dengan ideologi sosialis, ia memperkenalkan “*Burmese way to Socialism*” dengan mendirikan partai BSPP (*Burmese Socialist Program Party*) perubahan sistem politik ini menyebabkan pelanggaran bukan hanya terhadap nilai-nilai demokrasi melainkan juga terhadap hak asasi manusia yang terbilang parah dengan tingkat konflik dan penganiayaan terhadap etnik minoritas yang terus meningkat (Min, 2008)

Sedangkan Indonesia pada saat itu berada di bawah pimpinan Jendral Soeharto selama tiga dekade yang berlangsung sejak tahun 1962-1998. Pada masa pemerintahan

Soeharto Indonesia menerapkan sistem dwifungsi ABRI atau *dual functions military* dimana dengan sistem ini peran militer mendominasi dan memiliki control penuh terhadap negara dan pertahanan nasional. Model dwifungsi ini kemudian turut diadopsi oleh rezim militer Myanmar dan dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan militer. Namun diantara kesamaan yang dimiliki kedua negara ini terdapat perbedaan mendasar dalam proses transisi politik kedua negara ini, dimana Indonesia kini telah berhasil melaksanakan transisi politik ke sistem demokrasi dan kini telah secara aktif mendorong nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Sedangkan, Myanmar hingga saat ini masih berada dalam pengaruh junta militer.

Seiring mengamati proses demokrasi dan permasalahan kemanusiaan yang masih terjadi di Myanmar, berbagai kalangan dari komunitas Internasional, negara-negara di Eropa bahkan Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Melihat banyaknya tekanan tersebut, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk berdiri memberikan bantuan terhadap Myanmar untuk mencegah terjadinya isolasionisme Myanmar dengan meminta komunitas internasional untuk bersabar dan terus mendukung transisi demokrasi di Myanmar, hal ini disampaikan Indonesia melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa: *“We want Myanmar to fulfill its commitment to hold independent, transparent, democratic and inclusive elections... Nonetheless, one should not expect perfect conditions in Myanmar Instantly, as.. otherwise we will even not be able to see the development”*. (Lang, 2012). Pemerintah Indonesia menyadari bahwa perlu melakukan perubahan strategi pendekatan dengan mengkolaborasikan aspek politik, sosial dan ekonomi ke dalam sebuah pendekatan konstruktif yakni *Constructive Engagement*. Disamping itu Indonesia meyakini bahwa perubahan politik merupakan sebuah bentuk perubahan evolusioner yang membutuhkan waktu yang lama dan perkembangan sosial dan ekonomi sebagai aspek pendukungnya. Perubahan strategi pendekatan Indonesia ini pun menjadi sebuah metode baru dalam menelaah tujuan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar.

B. Literature Review

Dalam upaya menjelaskan constructive engagement sebagai strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar penulis akan menggunakan dua konsep dan satu model

Politik Luar Negeri

Definisi mengenai politik luar negeri dapat dimulai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya yang berjudul *The International Relations Dictionary* yang mengemukakan bahwa

“Foreign policy is a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis à vis other states or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest” (Jack C. Plano & Roy Olton, 1969)

Politik luar negeri merupakan sebuah strategi atau tindakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang ditujukan terhadap negara lain atau entitas internasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang didasarkan pada kepentingan nasional negara tersebut.

Politik luar negeri Indonesia terhadap Myanmar timbul sebagai respon terhadap tindakan Myanmar dan permasalahan demokrasi di negaranya yang turut mempengaruhi stabilitas Kawasan, kondisi geografis serta fakta kedekatan hubungan kedua negara yang telah terjalin cukup lama menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam merumuskan politik luar negeri Indonesia terhadap Myanmar.

Indonesia melalui politik luar negerinya menunjukkan kepemimpinan progresif dan membagikan pengalamannya dalam menangani konflik separatis, indonesia juga aktif dalam meyakinkan Myanmar melalui pendekatan bilateral bahwa permasalahan HAM di negara tersebut dapat diselesaikan begitu juga dengan isu demokratisasi dapat diatasi dengan baik apabila Myanmar berkomitmen untuk melepaskan sifat isolasionisme yang selama ini menghambat proses demokratisasi. Tindakan indonesia ini pun dinilai dapat mendorong pengurangan secara bertahap keterlibatan penggunaan kekuatan militer dalam hubungan politik negara yang baru melewati masa transisi demokrasi seperti yang dihadapi Myanmar (Holliday, 2008)

Konsep Diplomasi

Diplomasi merupakan sebuah instrument penting dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dan bagian dari upaya untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara lain, seperti yang diungkapkan oleh R.P. Barston dalam bukunya yang berjudul *Modern Diplomacy*, ia mengungkapkan bahwa :

“Diplomacy is concerned with the management of relations between states and between states and other actors. From a state perspective diplomacy is concerned with advising, shaping and implementing foreign policy. As such it is the means by which states through their formal and other representatives, as well as other actors, articulate, coordinate and secure particular or wider interests, using correspondence, private talks, exchanges of view, lobbying, visits, threats and other related activities” (R.P., 1997).

Diplomasi merupakan sebuah instrument penting dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara, diplomasi sendiri terbagi ke dalam dua bentuk yakni, *soft diplomacy* yang menitikberatkan pada penggunaan cara-cara damai dalam melakukan diplomasi dan *hard diplomacy*. yang cenderung mendukung penggunaan ancaman atau *hard power* sebagai tools dalam mendapatkan tujuan-tujuan diplomasi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menerapkan *Soft power diplomacy* sebagai instrument dalam melaksanakan politik luar negeri dalam mendukung demokratisasi di Myanmar. dimana *soft diplomacy* menjadi sebuah upaya yang dianggap efektif dan efisien tanpa harus menciptakan konfrontasi dengan Myanmar yang diketahui cukup selektif dalam menerima kerjasama dan bantuan dari pihak lain terutama apabila bersangkutan dengan isu demokrasi dan HAM yang selama ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh Myanmar. oleh sebab itu pemerintah Indonesia menyediakan strategi *soft power diplomacy* yang ditargetkan untuk dapat menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan Myanmar, mengajak Myanmar untuk berpartisipasi dalam forum pertemuan regional yang membahas mengenai penyelesaian masalah dalam menyelenggarakan demokratisasi dan penguatan HAM.

Seiring berjalannya waktu upaya-upaya ini diyakini dapat memberikan kontribusi positif bukan hanya kepada Indonesia sebagai negara yang menerapkan *soft power*

diplomacy melainkan juga terhadap Myanmar dimana melalui upaya ini Pemerintah Indonesia berharap dapat merangkul Myanmar dan mempengaruhi negara tersebut untuk menerapkan langkah-langkah demokratisasi yang lebih baik sehingga pada gilirannya hal ini dapat mendorong terciptanya model demokrasi yang stabil dan mendorong perlindungan serta pemeliharaan terhadap HAM di Myanmar.

Model Constructive Engagement

Constructive Engagement didasarkan pada sebuah premis bahwa dimungkinkan menerapkan tekanan terhadap pihak lain untuk menghasilkan perubahan yang bersifat konstruktif tanpa menggunakan metode paksaan terhadap suatu pihak (Crocker, 1986). Penolakan penggunaan sanksi dan strategi isolasi oleh model *Constructive Engagement* berakar asumsi mengenai tingkat keefektifitasannya. Sebab menurut model ini terdapat hubungan yang kuat antara aspek politik dan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan. dalam hal ini aspek ekonomi sendiri meliputi kerjasama dalam bidang ekonomi, melalui berbagai bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi ini maka diyakini dapat mendorong perubahan politik di dalam suatu negara (Ivanica, 1998). Oleh sebab itu jika ingin mendorong transisi sistem politik dalam negeri suatu negara maka hal lain yang harus diperhatikan ialah pentingnya untuk membentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang pada gilirannya akan mendukung keberlangsungan demokratisasi suatu negara. Model *Constructive Engagement* meyakini bahwa perubahan dalam sistem politik dapat dicapai apabila didukung oleh kondisi ekonomi dan sosial yang baik untuk menopang proses demokrasi yang terjadi dalam negeri.

Constructive Engagement sendiri mulai diadopsi oleh ASEAN pada tahun 1991 yang bertujuan untuk mendorong hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar. Hal ini dilakukan untuk mendukung perkembangan ekonomi-sosial dalam negeri Myanmar yang pada gilirannya perkembangan ini akan memberikan pengaruh terhadap liberalisasi politik dan demokratisasi di Myanmar (Masilamani Logan, Peterson Jimmy, 2014). Indonesia kemudian turut mengadopsi model *Constructive* untuk mendukung

penyelesaian masalah demokrasi di Myanmar. Pendekatan ini mengedepankan upaya konstruktif yang dibangun atas dasar solidaritas, kedekatan, persaudaraan dan kemitraan dalam berbagai bidang. *Constructive Engagement* ini dijadikan sebagai strategi diplomasi persuasif pemerintah Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar. Melalui strategi ini Indonesia berupaya untuk mengutamakan konsensus, menghindari terciptanya konfrontasi antara kedua negara dan mendorong semangat inklusif demi terwujudnya demokrasi dan pengutan perlindungan HAM di Myanmar (Hongwei, 2012)

Saat ini pemerintah Indonesia secara berkelanjutan terus menerapkan strategi *Constructive Engagement* dalam kebijakan politik luar negeri untuk melihat bahwa langkah-langkah demokratisasi Myanmar terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Penerapan Strategi ini sendiri dilakukan dengan menggelar kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan diikuti oleh pendekatan politis.

C. Strategi *Constructive Engagement* Indonesia Dalam Mendukung Demokratisasi Myanmar

Constructive Engagement menjadi pilihan strategis bagi Pemerintah Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar, hal ini dikarenakan keputusan untuk menggunakan strategi *Constructive Engagement* tidak terlepas langkah Indonesia untuk turut menerapkan nilai “Asean Way” yang merupakan bentuk diplomasi yang diterapkan antara negara anggota ASEAN. dan dalam hal ini *Constructive Engagement* merupakan subset dari “ASEAN way” yang ditujukan oleh komunitas regional ASEAN terhadap Myanmar dalam merespon perkembangan demokrasi dan HAM di negara tersebut.

Pemilihan penggunaan *Constructive Engagement* sebagai strategi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar lahir dari pertimbangan preseden regional yang menekankan pada prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara anggota, adanya konsensus regionalisme antara anggota ASEAN dan rasa tanggung jawab Indonesia yang tidak dapat membiarkan persoalan kemanusiaan dan demokrasi di Myanmar terus terjadi. Pemerintah Indonesia sendiri merefleksikan nilai “ASEAN way” dalam strategi *Constructive Engagement* melalui penggunaan metode dialog, konsultasi serta kerjasama yang bersifat inklusif guna menghindari terjadinya konfrontasi dengan pemerintah Myanmar.

Hingga saat ini Pemerintah Indonesia secara berkesinambungan dan konsisten menerapkan kebijakan *Constructive Engagement* terhadap Myanmar guna mewujudkan tujuan politik luar negeri untuk mendukung demokratisasi. Pemerintah Indonesia di sisi lain merasa perlu untuk memastikan bahwa Myanmar dapat menjalankan langkah-langkah demokrasi dan reformasi secara berkesinambungan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia sangat menekankan terciptanya konsolidasi demokrasi dalam negeri Myanmar, pengembangan kerja sama ekonomi, tertatasnya konflik komunal secara adil, bijak serta memperhatikan sisi kemanusiaan. (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015). Secara garis besar strategi ini telah menghasilkan berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui pelaksanaan hubungan diplomatiknya dengan Myanmar, yang dilaksanakan dengan; memberikan pendampingan dalam proses transisi politik melalui pendekatan bilateral serta multilateral yang terlihat dari pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) dan kontribusi aktif Institute for Peace and Democracy (IPD) dalam membangun kembali

nilai-nilai demokrasi di Myanmar, pelaksanaan kesepakatan kerangka kerjasama ekonomi dengan Myanmar sebagai salah satu upaya dalam mendukung terciptanya pembangunan nasional dalam negeri Myanmar, serta dengan melaksanakan misi diplomasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu menangani isu krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar yang diketahui telah mempengaruhi jalannya proses demokrasi di Myanmar.

Constructive engagement sebagai sebuah metode kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia dirumuskan dengan mempertimbangkan situasi yang dihadapi oleh Pemerintah Myanmar terutama terkait dengan kemunculan berbagai tekanan-tekanan dari luar sebagai bentuk respon dunia internasional terhadap permasalahan dalam negeri Myanmar. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan sebuah pendekatan yang berbeda terhadap Myanmar. Seperti yang telah diketahui bahwa Myanmar merupakan partner kerja sama ekonomi dengan China, India, Jepang dan ASEAN. Sehingga hal ini yang menyebabkan upaya yang bersifat konfrontatif seperti pemberian sanksi ekonomi dari negara-negara barat tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi junta militer yang berkuasa. Namun di sisi lain sanksi ekonomi dan suspensi bantuan kemanusiaan dari negara-negara barat berdampak terhadap kehidupan masyarakat biasa di Myanmar yang berlawanan dari rezim militer. Menyadari dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan sanksi dan isolasional, Pemerintah

Indonesia kemudian mengarahkan kebijakan politik luar negeri untuk lebih menekankan pada upaya-upaya yang dapat membantu Myanmar mengembangkan kebijakan distribusi kekayaan dengan lebih baik dan menghadirkan program bantuan sosial yang adil serta bijaksana.

D. Bentuk Upaya Constructive Engagement Pemerintah Indonesia Dalam Mendukung

Pemerintah Indonesia merefleksikan strategi *Constructive engagement* ke dalam berbagai bentuk upaya kebijakan dan metode pendekatan yang diyakini dapat menjadi sarana untuk mensukseskan pelaksanaan politik luar negerinya, yakni melalui: pendekatan politik secara bilateral maupun multilateral melalui pelaksanaan Bali Democracy Forum dan Institute For Peace and Democracy, penyelenggaraan kesepakatan kerjasama ekonomi dalam bentuk *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) dan penandatanganan *Framework Agreement on Trade and Investment between The Republic of The Union of Myanmar and The Republic of Indonesia*, serta melalui program bantuan kemanusiaan dalam mendukung penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar, di bawah ini merupakan penjelasan mengenai upaya *Constructive engagement* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Myanmar:

1). Melaksanakan pendekatan politik melalui Bali Democracy Forum dan Institute For Peace and Democracy

Melalui penyelenggaraan Bali Democracy Forum pemerintah Indonesia menargetkan untuk dapat turut berpartisipasi dalam mendukung proses demokrasi di Myanmar. Dalam pelaksanaannya BDF juga didukung oleh Institute For Peace and Democracy yang merupakan sebuah inisiatif dari pemerintah Indonesia yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan secara aktif memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi serta dapat dipahami sebagai bagian dari peran politik luar negeri Indonesia dalam membentuk institusi internasional (Sidauruk, 2015). Forum ini bersifat inklusif, ditandai dengan kehadiran dari negara-negara yang tidak menganut sistem demokrasi atau yang sedang menempuh proses transisi politik menuju negara demokratis seperti halnya Myanmar yang hingga saat ini masih berada dalam proses transisi politik.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa BDF merupakan bagian dari strategi atau upaya dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang juga dikenal sebagai bentuk diplomasi persuasive yang

mengadopsi pendekatan *Constructive engagement* dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini diketahui bahwa terdapat peran penting dialog dan komunikasi dalam diplomasi untuk memahami bagaimana suatu negara mewujudkan kepentingan nasionalnya (Westhuizen, 2014). Di samping itu Penyebaran nilai-nilai Demokrasi melalui BDF menekankan pada prinsip *homegrown democracy* dimana prinsip ini digunakan karena tiga faktor utama yaitu, *pertama*, karena adanya kesepakatan atas prinsip *non-interference* di antara negara-negara ASEAN. Prinsip ini melarang negara sesama anggota untuk saling melakukan intervensi, dan memberikan kebebasan bagi negara-negara anggota untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara tanpa campur tangan dari negara lain, yang mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Oleh sebab itu kebijakan politik luar negeri Indonesia juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip tersebut. (Wakhidah, 2014)

Sementara itu, sejak awal dibentuknya BDF, Myanmar diketahui selalu menghadiri forum tersebut sepanjang tahun 2008 hingga 2014. Dapat dikatakan bahwa BDF secara bertahap mulai mempengaruhi proses demokrasi yang terjadi di Myanmar, hal ini pun turut dirasakan oleh Myanmar yang memandang pentingnya BDF terutama karena tema yang diusung oleh BDF menjadi fase penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan domestik yang terjadi di negaranya. Tema yang diusung BDF berlandaskan pada agenda strategis atau mengangkat isu-isu yang terjadi di Kawasan.

Di samping itu BDF juga berperan dalam mendukung stabilitas regional guna terwujudnya semangat demokrasi di Asia. Seperti yang disampaikan oleh ketua delegasi Myanmar untuk BDF kedua U Maung Myint, ia mengungkapkan bahwa *“I wish to stress that democracy can only be established in an environment of peace and stability.. it is my belief that this 2nd Forum will also contribute to further promotion of democracy in the region”*. BDF secara tidak langsung berperan sebagai pendorong Myanmar untuk mengadopsi demokrasi melalui pendekatan berskala regional.

Sehingga dapat dikatakan bahwa peran BDF dapat secara efektif mempengaruhi transisi demokrasi di Myanmar juga dapat terjadi karena adanya inisiatif dari pihak rezim yang berkuasa di Myanmar untuk menerapkan langkah-langkah demokratisasi guna mewujudkan stabilitas negeri. Sementara itu jika dipahami lebih lanjut ide mengenai demokrasi pada hakikatnya tidak terlepas dari nilai-nilai yang diatur di dalam *Universal Declaration on Human Rights* 1948 yang meliputi indikator hak-hak fundamental yang membentuk demokrasi yaitu; hak politik dan hak sipil yang dapat

diukur dari kemampuan negara menyelenggarakan pemilu yang adil dan berkelanjutan yang melibatkan pihak sipil dan media, kemudian indikator lainnya ialah hak asasi sosial, budaya dan ekonomi.

Secara garis besar BDF sebagai forum yang diselenggarakan pada tingkat multilateral mampu memberikan pengaruh positif terhadap proses demokrasi di Myanmar. Hal ini dapat terlihat dari keputusan Myanmar untuk ikut serta dalam BDF. Melalui partisipasi aktif yang dilakukan oleh Myanmar tersebut tentunya dapat merubah persepsi terhadap identitas Myanmar. Dimana akan terbentuk sebuah persepsi baru yaitu Myanmar sebagai negara demokrasi. Perubahan persepsi ini pada gilirannya akan berdampak terhadap hubungan Myanmar dan negara lain serta upaya rekonsiliasi dengan negara-negara Barat yang sempat memberikan sanksi ekonomi terhadap Myanmar.

Selanjutnya pengaruh lain yang ditimbulkan oleh BDF ialah munculnya kesadaran antara para elit politik dan rezim militer di Myanmar akan pentingnya untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini terlihat dari keinginan Myanmar untuk bekerjasama dengan IPD dalam mendorong proses transisi demokrasi Myanmar. Seperti yang telah diketahui bahwa IPD merupakan lembaga lanjutan dari BDF yang bertujuan untuk merealisasikan ide-ide yang muncul dalam forum BDF dan membantu memecahkan problematika yang turut hadir dari dalam forum melalui beragam program kerja yang tepat. Dalam memberikan bantuan terhadap proses transisi demokrasi Myanmar IPD tidak menggunakan metode pemaksaan atau yang menuntut Myanmar untuk segera mengadopsi sistem demokrasi. IPD memiliki pandangan bahwa proses belajar dan memahami praktik demokrasi sangatlah penting dalam membangun demokrasi. Bentuk pendekatan dan metode inilah yang membuat BDF dan IPD digemari oleh banyak pihak yang tertarik untuk ikut serta di dalamnya. Melalui BDF negara demokratis dan non demokratis di pertemukan dalam satu forum yang sama dan masing-masing pihak dapat saling belajar mengenai praktik demokrasi dari negara-negara yang dinilai menjalankan praktik demokrasi dengan baik, negara-negara non demokratis ini kemudian akan dibantu oleh IPD dalam hal proses transisi (Rahman, 2017). Oleh karena itu BDF dapat dikatakan sebagai sebuah platform guna membantu proses pembuatan kesepakatan transisi demokrasi dan di sisi lain IPD kemudian menjadi institusi yang membantu dalam merealisasikan gagasan dan ide-ide yang terlahir dari forum BDF.

Salah satu bukti pencapaian IPD dalam membantu proses transisi demokrasi ialah, ketika IPD berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai negara yang bersedia turut berpartisipasi untuk mendukung demokrasi Myanmar. Seperti halnya pada tahun 2011, IPD bersama Norwegia dan Australia mengatur sebuah workshop dan mengajak Myanmar membahas mengenai berbagai langkah-langkah strategis dalam proses transisi demokrasi. Munculnya reaksi positif yang diikuti dengan keinginan Norwegia dan Australia untuk turut bekerjasama dengan IPD dalam mendukung demokrasi Myanmar menunjukkan bentuk kepercayaan kedua negara yang diperoleh melalui dialog konstruktif dan komunikasi BDF. Dalam hal ini IPD mampu menjadi fasilitator bagi negara-negara yang ingin mendukung proses transisi demokrasi Myanmar seperti Norwegia dan Australia serta mampu menjalin kerja sama yang baik dengan negara-negara tersebut. Sejak tahun 2012, Australia memberikan bantuan sebesar USD 1,7500,000 untuk membiayai akomodasi IPD hingga tahun 2015 dan bantuan sebesar AUD 140,000 untuk menyelenggarakan workshop di Yangon, Myanmar. Kemudian di sisi lain Norwegia juga memberikan bantuan sebesar NOK 1,800, 000 untuk membangun pusat stabilitas perdamaian dan demokrasi Myanmar (Institute For Peace and Democracy, 2012). sehingga dapat dikatakan bahwa IPD telah menjadi pihak ketiga yang mempertemukan negara yang bersedia membantu dan Myanmar.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Freedom House mencatat bahwa sejak kemunculan BDF dan IPD terdapat kenaikan angka tren positif transisi demokrasi Myanmar tepatnya pada indeks demokrasi yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 21-24 poin pada tahun 2012-2014. Walaupun sepenuhnya tidak dapat dikatakan bahwa kenaikan indeks ini disebabkan oleh kehadiran BDF dan IPD namun partisipasi aktif yang dilakukan oleh BDF dan IPD dalam membantu proses transisi demokrasi Myanmar turut menjadi faktor pendukung dalam peningkatan indeks tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Freedom House menunjukkan terdapat perbaikan pada aspek hak politik dan hak sipil seperti pemilu dan kebebasan sipil yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 6 dan 5 poin (Puddington, 2013)

Namun dalam penelitian ini Freedom House juga menunjukkan tantangan besar lainnya yang dihadapi dalam upaya transisi demokrasi Myanmar. Yaitu, kearifan lokal dimana hampir 90% masyarakat Myanmar menganut agama Buddha. Berdasarkan data dari Asian Barometer Survey (ABS) pada tahun 2015, sebanyak 95% masyarakat Myanmar meyakini jika semakin banyak kepercayaan dalam negeri maka akan berdampak pada munculnya kekacauan. Hal ini

tentunya menunjukkan tingginya angka anti-pluralisme dalam Myanmar. Sehingga tak ayal apabila etnis mayoritas seperti Buddha menganggap bahwa kehadiran agama lain selain Buddha seperti Islam dan agama lainnya akan menjadi hambatan bagi agama mereka. Buddha yang menjadi agama mayoritas telah berakulturasi dengan konteks sosial-budaya dan membentuk kearifan lokal dengan aliran Theravada yang dimilikinya. Seperti yang telah diketahui bahwa ajaran Theravada Buddhism menjadi salah satu kunci munculnya isu domestik dan tantangan dalam proses transisi demokrasi. Dapat diketahui bahwa aspek pendidikan sosial, budaya dan keagamaan menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam menangani paham anti-pluralisme.

Dalam hal ini peran IPD dalam berpartisipasi untuk menyelesaikan isu ini terlihat dari upaya IPD menyelenggarakan *interfaith dialogue* guna menumbuhkan pemahaman keagamaan yang bersifat moderat, sehingga kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat mampu merekonstruksi pemahaman akan demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu sebagai bagian dalam upaya untuk mendukung transisi demokrasi dalam masyarakat Myanmar, IPD yang turut memperhatikan pentingnya untuk menyebarkan demokrasi di kalangan *grass root*. Peran IPD dalam hal ini terlihat melalui pelatihan yang dilaksanakan dengan seluruh elemen sipil adalah dirasa cukup efektif untuk membantu menumbuhkan kesadaran akan demokrasi secara *bottom-up* guna mewujudkan demokrasi substansial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam praktiknya.

2). Meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia-Myanmar

Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang potensial dengan Myanmar, hal ini juga tentunya didukung dengan pertimbangan pemerintah Indonesia yang melihat pentingnya untuk menggabungkan *developmental approach* melalui berbagai kerja sama dalam bidang ekonomi untuk mendukung transisi politik di Myanmar, sebab seperti yang telah diketahui strategi *Constructive Engagement* yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menekankan pada penggunaan pendekatan konstruktif yang melibatkan aspek ekonomi ke dalam upaya perubahan politik. Pemerintah Indonesia melihat potensi kerja sama ekonomi yang dapat dilakukan dengan Myanmar guna mewujudkan kepentingan nasional Indonesia terutama dalam mendukung keberlangsungan proses demokrasi di Myanmar. Oleh sebab itu sejak tahun 2011-2017 pemerintah Indonesia telah secara intensif mempererat hubungan ekonomi dengan Myanmar melalui berbagai bentuk kesepakatan kerja sama bilateral

a) *.Kerjasama Ekonomi Melalui Joint Commission between the Republic of Indonesia and the Union of Myanmar*

Pertemuan Joint Commission between Indonesia and Myanmar pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007 di Jakarta, Indonesia. Joint Commission ini merupakan lanjutan dari MoU antara Indonesia dan Myanmar dalam mendirikan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* yang ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri, Dr. N. Hassan Wirajuda dan Menteri Luar negeri Myanmar, U Nyan Win, selama kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Yangon, Myanmar, pada 2006. Joint Commission ini merupakan sebuah awal baru bagi kerja sama bilateral kedua negara yang membuka peluang pertumbuhan tren positif ekonomi di kedua negara terutama bagi Myanmar selama proses transisi politik yang dilakukan. (Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, 2007). Selanjutnya pada tahun 2011 kembali diadakan pertemuan JCBC kedua, dan dipertemuan kali ini kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan nilai perdagangan sebesar USD 500 juta pada tahun 2015.

Joint Commission ini memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk melihat kembali hubungan bilateral dan kemudian merancang roadmap untuk menandatangani kesepakatan kerja sama. Pada pertemuan ini juga pemerintah Indonesia kembali menekankan kesiapannya dalam membentuk kerja sama yang kuat dengan Myanmar dalam hubungannya dengan mendorong upaya demokratisasi Myanmar serta pada kesempatan ini pula Indonesia menawarkan bantuan dalam upaya mewujudkan demokrasi dan *good governance* di Myanmar. Dalam mewujudkan upaya tersebut pemerintah Indonesia akan mengerahkan berbagai lembaga dan institusi dalam negeri untuk terlibat langsung dalam memberikan bantuan terhadap Myanmar, seperti melalui mengundang institusi terkait di Myanmar untuk ikut serta dalam mengembangkan kerjasama dengan KPU, Komnas HAM dan LIPI.

Hal ini tentunya dapat diartikan sebagai strategi pemerintah Indonesia dalam membagikan pengalamannya dalam melaksanakan proses demokrasi pada masa transisi politik. Sementara itu kerjasama antara Indonesia dan Myanmar juga akan diperluas ke berbagai aspek seperti pertahanan dan keamanan, dimana kedua negara juga membicarakan kerjasama mengenai pertukaran informasi dan upaya peningkatan kapasitas antar institusi berbasis militer serta kepolisian kedua negara. Di sisi lain berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan pemerintah

Myanmar tentunya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar melalui pemanfaatan berbagai elemen kerjasama bilateral yang mencakup bidang ekonomi, politik dan keamanan. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa pengalaman Indonesia dalam melakukan transisi politik pada era reformasi dapat mendukung pencapaian target kerja sama kedua negara terutama dengan melihat kesamaan sejarah transisi politik yang membuka potensi kolaborasi kedua negara dalam hal memperomosisikan good governance, demokrasi dan HAM. (Than, 2012)

Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Myanmar melalui JCBC kemudian terus mengalami perkembangan dengan diadakannya pertemuan JCBC ketiga tingkat Menteri yang diselenggarakan pada 12 Juni 2013 di Nusa Dua Bali. Dalam pertemuan kali ini Indonesia yang di wakili oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Myanmar yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin mendiskusikan mengenai rencana untuk mempererat hubungan kerja sama dalam memajukan nilai-nilai demokrasi terutama dalam hal pembangunan kapasitas, resolusi konflik komunal dan pembangunan sosial- ekonomi, investasi dan perdagangan; energy dan keamanan pangan; begitu juga dengan mobilisasi penduduk kedua negara. (Post, 2013)

Kerja sama Capacity Building antara Indonesia-Myanmar diperkuat kembali dengan diartikulasikannya dan dimulainya “Blue Book on Indonesia-Myanmar Capacity Building Partnership 2013-2015”, dimana buku ini berisi mengenai berbagai program kerja sama dalam meningkatkan kapasitas di berbagai area yang didedikasikan untuk Myanmar dalam kurun waktu 2013-2015. Selain itu kedua Menteri Luar negeri dari dua negara tersebut juga sepakat untuk kembali mendorong pencapaian target perdagangan senilai USD 1 miliar pada tahun 2016 serta untuk meningkatkan nilai investasi antara Indonesia dan Myanmar (Anantara, 2013). Seperti yang diketahui bahwa nilai perdagangan antara Indonesia-Myanmar mencapai USD 465 juta, dimana mengalami peningkatan sebesar 7,98% dari tahun 2011 yang hanya mencapai USD 430,7 juta. Sedangkan di bidang investasi sendiri, nilai investasi Indonesia sampai dengan tahun 2012 mencapai USD 241,5 juta yang membuat Indonesia berada di posisi ke-14 dan selanjutnya diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan menguatnya minat perluasan usaha korporasi Indonesia ke Myanmar. Kemudian mengikuti pertemuan JCBC. Sebelumnya pertemuan ketiga JCBC ini mengikuti penandatanganan perjanjian tiga kerjasama ekonomi yang dilakukan di Myanmar oleh Presiden Myanmar U Thein Sein dan Presiden Indonesia Susilo Bambang

Yudhoyono pada bulan April. Dokumen yang ditandatangani oleh dua kepala negara tersebut meliputi *Framework agreement on trade and investment between The Ministry of trade of the Republic of Indonesia and The Ministry of National Planning and Economic Development of the Republic of The Union of Myanmar* dan dua *memoranda of understanding on cooperation in human resource and on rice trade* (Xinhua, 2013). Selanjutnya pada tahun 2015 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, perjanjian ekonomi ini kemudian di ratifikasi ke peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2015 (RI, 2015).

Upaya ini kemudian menunjukkan keseriusan dan keberlanjutan langkah pemerintah Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah Myanmar dalam rangka mewujudkan agenda kepentingan nasional yang telah dimulai dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut hingga masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Komitmen untuk terus melanjutkan agenda politik luar negeri yang berkaitan dengan mewujudkan demokrasi di Myanmar masih dapat terlihat dalam pemerintahan Presiden Jokowi melalui kebijakan politik luar negeri yang mengandung strategi *Constructive Engagement* dalam penerapannya.

b) Mengadakan Diskusi Antara Para Pengusaha Indonesia-Myanmar Melalui Event Business Matching

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon bekerjasama dengan Kadin Myanmar untuk menyelenggarakan sebuah acara yang dikenal sebagai Business Matching pada tahun 2017. Dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah investasi dan perdagangan kedua negara, forum ini kemudian mengundang 50 pengusaha dari 33 perusahaan Indonesia serta 50 pengusaha dari Myanmar untuk mendiskusikan topik dari berbagai aspek seperti energi solar, batubara, obat-obatan farmasi, listrik, daging dan susu, komoditas, baju dan textile, kerajinan tangan, kopi, the hingga makanan tradisional dari Indonesia. (Soe, 2017)

Melalui forum ini Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha dan perusahaan dari kedua negara untuk saling mempromosikan produknya, bernegosiasi atas masing-masing produknya dan saling melakukan export produk tersebut. Bahkan sebagian dari pengusaha Indonesia kemudian memutuskan untuk melakukan investasi di Myanmar dan membangun perusahaan di negara tersebut. Pada kesempatan ini pula Pemerintah Indonesia kembali menekankan rencananya untuk melakukan investasi pada sektor pertambangan, teknologi

dan informasi serta infrastruktur. Mengingat peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia-Myanmar pada tahun 2017 yang mencapai USD 973 juta. (KEMLU RI, 2018). Dalam Forum ini Deputi Kementerian Perdagangan Myanmar U Aung Htoo juga menyampaikan kepada para pelaku usaha di Myanmar untuk meniru kesuksesan bisnis Indonesia, sehingga forum ini juga dijadikan sebagai kesempatan bagi para pengusaha Myanmar untuk belajar dan bertukar informasi serta pengalaman dengan pengusaha Indonesia. Forum ini juga diyakini sebagai sebuah upaya Pemerintah Indonesia untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di Myanmar melalui perkembangan bisnis dari para pengusaha dalam negeri.

3). Menerapkan Diplomasi Kemanusiaan dalam mendukung penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar

Krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Rakhine State, Myanmar telah berkembang menjadi salah satu krisis yang paling kompleks. Indonesia sebagai negara yang telah berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai HAM seiring dengan mendukung perwujudan demokrasi di Myanmar menunjukkan kontribusinya dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa muslim minoritas Rohingya di Myanmar. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim dan terbesar di wilayah Asia Tenggara dituntut untuk secara efektif memberikan partisipasi aktif dalam menanggapi konflik kemanusiaan terbesar di kawasan. Krisis ini juga tentunya telah menarik perhatian komunitas internasional untuk turut terlibat dalam penyelesaiannya, seperti halnya ASEAN. Namun dalam hal ini organisasi di kawasan Asia Tenggara tersebut tidak mampu untuk terlibat jauh dan secara efektif mendorong menyelesaikan konflik kemanusiaan Myanmar akibat prinsip non intervensi yang menjadi penghalang bagi ASEAN untuk menindaklanjuti krisis tersebut. Namun bagi Indonesia terlepas dari prinsip non intervensi tersebut, Indonesia melalui strategi pendekatan konstruktifnya terus berusaha untuk menegakkan HAM di Myanmar.

Seperti yang diketahui, Indonesia telah menunjukkan kesediaannya dalam menggelar dukungan lebih luas dari komunitas Internasional selain ASEAN dalam menangani konflik di Myanmar salah satunya seperti yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa pada tahun 2012 dengan memperkenalkan diplomasi moral, melalui strategi diplomasi ini Marty mengajak Organization of the Islamic Conference (OIC) untuk mengambil tindakan dan membantu menghentikan operasi berdarah di Rakhine, sebagai hasilnya pertemuan yang dilakukan di

Mekkah, Saudi Arabia tersebut telah memutuskan untuk membawa isu krisis kemanusiaan Rohingya di hadapan majelis umum PBB dengan mempertimbangkan penderitaan yang dialami oleh muslim Rohingya dalam menghadapi kekerasan oleh pihak otoritas Myanmar dan penolakan pemerintah dalam mengakui kewarganegaraan penduduk Rohingya (Hunt, 2012). Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia ini tidak terlepas dari tujuan politik luar negeri Indonesia untuk mempromosikan HAM dan memastikan keberlangsungan penerapan nilai-nilai demokrasi di Myanmar, dengan munculnya krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, hal ini dinilai dapat menghambat proses demokratisasi yang berlangsung di Myanmar dan mendorong munculnya asumsi buruk mengenai kepemimpinan pemerintah Myanmar atas kegagalannya dalam melindungi hak etnis minoritas dan menjaga keamanan domestik.

Di sisi lain upaya Pemerintah Myanmar untuk melakukan pembangunan nasional tidak dapat terwujud apabila Pemerintah tidak dapat mengatasi isu kemanusiaan yang telah menarik perhatian komunitas internasional. Oleh sebab itu Indonesia sebagai salah satu negara yang sejak awal telah berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi di Myanmar harus dapat menunjukkan kontribusi aktifnya dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya dan memastikan konflik ini tidak menghentikan langkah demokratisasi di Myanmar. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu pihak yang secara aktif menggelar dukungan dan bantuan terhadap krisis kemanusiaan di Rohingya juga dapat dikarenakan oleh kepentingan Indonesia dalam mempertahankan stabilitas kawasan dari dampak yang diakibatkan oleh meningkatnya arus jumlah pengungsi penduduk Rohingya.

Oleh sebab itu pemerintah Indonesia terus mendesak Pemerintah Myanmar untuk dapat segera menyelesaikan masalah tersebut. Menganggapi situasi yang memburuk di Rakhine State, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah yang dibutuhkan dalam menyelesaikan krisis Rohingya. Upaya pemerintah Indonesia melalui diplomasi kemanusiaan mulai membuahkan hasil dengan diterimanya bantuan dari Indonesia oleh Pemerintah Myanmar dan menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang berkesempatan mendistribusikan bantuan ke dalam negara tersebut. Sebagai tindak lanjut dari bagian rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar dan kondisi di lapangan, pada Agustus 2017, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meluncurkan sebuah Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) kepada Myanmar. Program ini merupakan bentuk komitmen dari 11 LSM yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) program ini memiliki tujuan utama yakni,

memberikan bantuan jangka menengah serta panjang untuk penduduk Myanmar secara inklusif, khususnya yang berada di wilayah Rakhine State.

Terdapat 4 program utama yang diluncurkan meliputi; pendidikan, kesehatan, ekonomi dan *capacity building*. Program tersebut secara keseluruhan bernilai US\$ 2 juta yang berasal dari jumlah donasi yang digalang oleh masyarakat Indonesia. Langkah diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia kemudian berlanjut hingga lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan Kounselor Myanmar Aung San Suu Kyi pada 4 September 2017. Dalam pertemuannya dengan Suu Kyi, Pemerintah RI melalui Menteri Retno Marsudi menyampaikan usulan Formula 4+1 untuk diterapkan terhadap krisis di Rakhine State. Formulai ini mengandung empat elemen utama yang meliputi: 1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan; 2. Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan tindakan kekerasan; 3. Perlindungan terhadap semua orang yang berada di wilayah Rakhine State, tanpa memandang dari latar belakang suku dan agama; dan 4. Pentingnya segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Serta satu elemen tambahan yaitu implementasi dari rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan. Misi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia juga berhasil mencapai pencapaian penting lainnya dengan disepakatinya bukan hanya Indonesia melainkan juga ASEAN untuk terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. (Indonesia M. O., 2017)

E. Kesimpulan

. Keterlibatan Indonesia dalam keberlangsungan proses demokrasi di Myanmar tidak terlepas dari sejarah hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin dari masa pra dekolonisasi hingga saat ini. Pemerintah Indonesia melalui strategi *Constructive Engagement* berusaha untuk menerapkan sebuah bentuk pendekatan diplomasi yang bersifat konstruktif dengan berlandaskan semangat inklusif guna mewujudkan demokrasi dan perbaikan atas perlindungan HAM di Myanmar. Perumusan strategi *Constructive Engagement* mencerminkan arah politik luar negeri Indonesia yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Indonesia dalam hubungannya dengan Myanmar. Keputusan untuk menetapkan strategi *Constructive Engagement* sebagai metode diplomasi Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar juga tidak terlepas dari pertimbangan Pemerintah Indonesia terhadap situasi politik dalam negeri Myanmar. Selama lebih dari enam dekade Myanmar telah melalui berbagai situasi dan instabilitas politik yang ditimbulkan

dari proses transisi. Myanmar yang memiliki kesamaan historis dan kultural dengan Indonesia menghadapi hambatan yang dating dari konflik internal antara kelompok etnis minoritas dengan otoritas pemerintahan dalam hal ini rezim militer. Pada akhirnya situasi dalam negeri Myanmar kemudian mengundang berbagai reaksi yang berbeda dari komunitas internasional. Dari berbagai reaksi tersebut tak jarang ditemukan negara-negara yang mengecam tindakan anarkis rezim militer Myanmar dan memutuskan untuk menerapkan sanksi ekonomi sebagai bentuk kecaman terhadap Myanmar. Indonesia menilai bahwa tindakan pemberian sanksi ekonomi tidak dapat membantu menyelesaikan persoalan internal di Myanmar bahkan dapat menghambat langkah demokratisasi di Myanmar. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia mengambil bentuk *pendekatan Constructive Engagement* yang menitikberatkan pada penggunaan pendekatan politik, ekonomi dan sosial guna mewujudkan perubahan politik dan mengubah Myanmar menjadi negara yang demokratis dan menjunjung prinsip-prinsip HAM.

Daftar Pustaka

- Anantara, W. (2013, Juni 12). *Merdeka Post*. Retrieved from Merdeka wen site:
<https://www.merdeka.com/peristiwa/menlu-indonesia-bantu-pembangunan-daerah-bekas-konflik-myanmar.html>
- Crocker, C. (1986). South Africa; Strategy For Change. *Foreign Affairs vol 59 no. 2*.
- Holliday, I. (2008). Voting and violence in myanmar, nation building for a transition to democracy. *asian survey, vol. 48 no. 6*.
- Hongwei, F. (2012). ASEAN's Constructive Engagement Policy Toward Myanmar. *China International Studies*.
- Hunt, L. (2012, Agustus 17). *The Diplomat*. Retrieved from The Diplomat web site:
<https://thediplomat.com/2012/08/indonesias-moral-diplomacy/>
- Indonesia, M. o. (2007, February 14). *Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia Web Site:
<https://www.kemlu.go.id/en/berita/siaran-pers/Pages/The-First-Joint-Commission-between-the-Republic-of-Indonesia-and-the-Union-of-Myanmar-14-15-February.aspx>
- Indonesia, M. O. (2017, September 4). *News: Ministry Of Foreign Affairs Republic Indonesia*. Retrieved from Ministry Of Foreign Affairs Republic Indonesia:
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-Serahkan-usulan-Formula-41-untuk-Rakhine-State-kepada-State-Counsellor-Myanmar.aspx>
- Institute For Peace and Democracy. (2012, December). *Institute For Peace and Democracy*. Retrieved from Friends of IPD: <https://www.ipd.or.id/friends-of-ipd.htm>

- Ivanica, V. (1998). *Constructive Engagement and Constructive Intervention: A Useful Approach To Security In Asia Pasific*. Retrieved from Focus On Theb Global South:
<https://focusweb.org/content/constructive-engagement-and-constructive-intervention-useful-approach-security-asia-pacific>
- Jack C. Plano & Roy Olton. (1969). *The International Relations Dictionary*. United States of America: Holt, Rinehart and Winston Inc.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Buku Diplomasi Indonesia 2014*. Jakarta: Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.
- KEMLU RI. (2018, September 17). *Indonesia-Myanmar Bussiness Matching 2018*. Retrieved from KBRI di YAnon Myanmar: <https://www.kemlu.go.id/yangon/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Business-Matching-2018.aspx>
- Lang, J. (2012, may 22). *Fair observer org*. Retrieved from Fair observer web site:
https://www.faiobserver.com/region/asia_pacific/indonesia-myanmar-relations-promoting-democracy-south-east-asia/
- Masilamani Logan, Peterson Jimmy. (2014). The "Asean Way": The Structural Underpinings of Constructive Engagement. *Foreign Policy Journal*.
- Min, W. (2008). Looking Inside The Burmese Military. *Asian survey vol 48 no.6*.
- Post, P. (2013, Juni 13). *The President Post* . Retrieved from The president post web site:
<http://en.presidentpost.id/2013/06/13/the-third-meeting-of-the-joint-commission-of-indonesia-myanmar/>
- Puddington, A. (2013). *Freedom In The World 2013*. Freedom House.
- R.P., B. (1997). *Modern diplomacy*. New York,: Longman.
- Rahman, V. E. (2017). *Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Retrieved from Pengaruh Bali Democracy Forum Terhadap Transisi Demokrasi Myanmar Periode 2012-2014:
<file:///E:/My%20Thesis/Peran%20BDF%20dan%20IPD.pdf>
- RI, B. (2015). *JDIH BPK RI* . Retrieved from JDIH BPK RI web site:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41827/perpres-no-79-tahun-2015>
- Sidauruk, W. R. (2015). Peran The Institute For Peace and Democracy (IPD) Dalam Demokratisasi di Myanmar. *JOM Fisip Vol. 2 No. 1*, 1-13. Retrieved from Peran The Institute For Peace adn Democracy Dalam Demokratisasi di Myanmar.
- Soe, Y. N. (2017, September 30). *investment, trade with Indonesian entrepreneurs discussed*. Retrieved from The Global New Light of Myanmar:
<http://www.globalnewlightofmyanmar.com/investment-trade-indonesian-entrepreneurs-discussed/>
- Than, Z. W. (2012, Januari 09). *Myanmar Times*. Retrieved from Myanmar Times Web site:
<https://www.mmtimes.com/business/1291-indonesia-trade-to-hit-500-million-by-2015.html>

- Wakhidah, N. (2014). *Departemen Ilmu Hubungan Internasional*. Retrieved from Prinsip Non-Intervensi Asean dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar:
<http://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalog/prinsip-non-intervensi-asean-dalam-upaya-penyelesaian-konflik-rohingya-di-myanmar/>
- Westhuizen, S. V. (2014). *Foreign Policy, Public Diplomacy and The Media: The Case of South Africa*. South Africa.
- Xinhua. (2013, April 24). *Global Times*. Retrieved from Global Times Web site:
<http://www.globaltimes.cn/content/777160.shtml>

